

Jaringan Buruh Migran

  @jariburuhmigran



Mengawal Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Tentang JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM)

Jaringan Buruh Migran (JBM) terbentuk pada 12 September 2014. "Jaringan Buruh Migran" —terdiri dari 26 organisasi peduli nasib buruh migran— adalah identitas baru dari Jari PPTKILN. Jari PPTKILN dibentuk 2010 ketika revisi RUU 39/2004 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010–2014 dan selama empat tahun Jari PPTKILN aktif mengawal proses revisi RUU 39/2004 hingga masa periode anggota DPR berakhir pada 2014.

Apa program kerja JBM?

Perubahan ini bertujuan mengintensifkan gerakan jaringan dan untuk menjaring dukungan yang lebih besar dari masyarakat sipil dalam mengawal RUU 39/2004 dan isu-isu buruh migran lainnya. Kerja JBM meliputi pengawalan kebijakan/legislasi, penanganan kasus dan isu buruh migran di tingkat ASEAN terutama menyikapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk mendukung kerja JBM, dibentuk satu seknas dan tiga presidium. Tiga presidium adalah Legislasi, Penanganan Kasus dan ASEAN.

Capaian Kerja

1. Kertas posisi yang berisi isu-isu krusial perbaikan RUU 39/2004. Kertas posisi ini sudah disebar ke pemerintah dan anggota DPR periode 2009-2014 sebagai masukan dari masyarakat sipil. Beberapa usulan PPTKILN sudah tercantum dalam draft revisi RUU PPILN yang dibahas di Panitia khusus antara pemerintah dan DPR pada tahun 2012-2013
2. Lobby, audiensi dan hearing dengan beberapa anggota DPR RI, pemerintah dan ormas keagamaan

3. Aktif dalam melakukan kampanye di media sosial untuk mengawal RUU Perubahan No. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
4. Aktif berkampanye melalui media terkait dengan respons masyarakat sipil terhadap perlindungan buruh migran dan keluarganya
5. Aktif dalam berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi-organisasi di dalam dan di luar negeri yang bergerak di isu buruh migran untuk mengawal kebijakan perlindungan buruh migran
6. Aktif dalam menangani kasus buruh migran agar mendapatkan hak-haknya

Visi

Memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya melalui intervensi kebijakan sesuai dengan UU No 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Misi

1. Berperan aktif dalam mengawal pembuatan kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia.
2. Berperan aktif dalam mendorong dan memonitoring terlaksananya tanggungjawab negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia.
3. Membangun dukungan publik untuk mengawal pembuatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia.

Anggota: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI Reformasi), ASEAN Employees Services Trade Union Council (ASETUC), Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) Belanda, Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO), BMI-SA, Union Migrant Indonesia (UNIMIG), Human Rights Working Group (HRWG), Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, Lembaga Advokasi Buruh Migran (ADBMI) Lombok, Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LBH FAS), Migrant Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI Jakarta), Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, Trade Union Rights Centre (TURC), The Institute for Ecosoc Rights, Seruni Banyumas, Persatuan TKI Malaysia anti Diskriminasi (Pertimat Malaysia), Migrant Aids, PBH-BM

Kepengurusan JBM | Kontak kami

- Seknas JBM
–PIC : Savitri Wisnuwardhani (+6282124714978)
- SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)–Presidium Pokja Legislasi
–PIC: Hari (+628525930 7953)
Bobi A.M. (+6285283006797)
- LBH Jakarta –Presidium Pokja Penanganan Kasus
–PIC: Tiwi (+62813 8740 0670)
Eny R (+6281213305121)
- HRWG (Human Rights Working Group) – Presidium Pokja ASEAN | –PIC: D. Awigra (+62817.692.1757)



JBM dan organisasi2 TKI yg lain hadir dalam dengar pendapat dg Komisi IX DPR-RI Januari 2016 untuk menawarkan .masukan revisi UU 39/2004



Jaringan Buruh Migran memberikan rekomendasi perbaikan rancangan undang-undang pekerja migran Indonesia dalam suatu konferensi media



Audiensi dg Dirjen Binapenta Kemenaker, Februari 2016, tentang pembaruan kerangka perlindungan TKI revisi UU 39/2004 39/2004



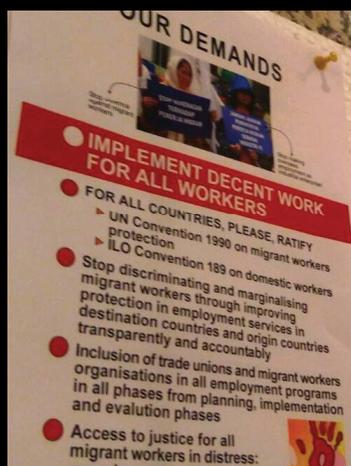
JBM mendesak PUU DPR untuk mempertimbangkan usulan perbaikan rancangan revisi UU 39/2004, Mei 2015



Anggota-anggota JBM sedang menyusun salah satu kertas posisi untuk menegaskan pilihan perlindungan buruh migran, di kantor TURC Pejompongan, Jakarta, Oktober 2015



Para PRT migran di Singapura yg tergabung dlm IFN dan HOME bersama dg JBM serius belajar bersama untuk memberikan usulan perbaikan perlindungan TKI dalam revisi UU 39/2004, April 2016



Dalam Global Forum on Migration & Development di Turki, 2015, JBM ikut berkampanye agar semua negara di dunia melindungi buruh migran dg menerapkan praktik kerja layak & mengesah Konvensi PBB 1990 & KILO 189



JBM dan organisasi2 TKI juga berdiskusi tt pentingnya pembaruan perlindungan TKI dg Dewan Pertimbangan Presiden, November 2015